
Peningkatan kualitas Perusahaan Jasa pertambangan (Subkontraktor) dengan metode Good Mining Practice (GMP) berbasis pendekatan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018

Trio Aris Chrisdianto*, M. Osaegi A, Aifah, Reggina Shafira Luthi, Wahyu Saputra

PT Putra Perkasa Abadi, Indonesia

Email: trioaris@ppa.co.id*, muhammad.osaegi@ppa.co.id, aifah_11@ppa.co.id, rshafiraluthi@gmail.com, wahyusaputrappa@gmail.com

Abstrak

Peningkatan permintaan batubara Asia yang diproyeksikan mencapai 7 miliar ton pada 2030 menuntut perusahaan jasa pertambangan untuk meningkatkan kualitas operasional dan keselamatan. PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menerapkan prinsip Good Mining Practice (GMP) berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 serta Contractor Safety Management System (CSMS) dalam pengelolaan 35 perusahaan subkontraktor di wilayah konsesi PT Borneo Indobara. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kinerja subkontraktor melalui manajemen berbasis GMP. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui evaluasi lapangan dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap enam aspek GMP, yaitu teknis, keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, kepatuhan SMKP, tata kelola usaha, dan perbaikan berkelanjutan. Hasil baseline Semester II 2024 menunjukkan skor kinerja awal sebesar 59%, dengan kelemahan utama pada aspek perbaikan dan lingkungan hidup. Program perbaikan selama satu tahun menghasilkan peningkatan skor keseluruhan menjadi 68%, serta peningkatan signifikan pada kesadaran pencegahan kelelahan kerja, efektivitas Safety Accountability Program, dan pelaksanaan audit 5R. Penerapan pengelolaan subkontraktor berbasis GMP yang diperkuat dengan panduan terstruktur dan manajemen risiko terbukti efektif meningkatkan budaya keselamatan, disiplin operasional, dan kualitas kinerja. Namun, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan kinerja.

Kata Kunci: Pengelolaan perusahaan Jasa Pertambangan, CSMS, Putra Perkasa Abadi

Abstract

The increase in demand for Asian coal, which is projected to reach 7 billion tons by 2030, requires mining service companies to improve operational quality and safety. PT Putra Perkasa Abadi (PPA) applies the principles of Good Mining Practice (GMP) based on the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1827 of 2018 and the Contractor Safety Management System (CSMS) in the management of 35 subcontractor companies in the concession area of PT Borneo Indobara. This research aims to evaluate and improve the quality of subcontractor performance through GMP-based management. The research uses a qualitative descriptive method by collecting primary data through field evaluations and interviews, as well as secondary data from performance documents. The evaluation was carried out on six aspects of GMP, namely technical, mining safety, environment, SMKP compliance, business governance, and continuous improvement. The baseline results for the second semester of 2024 show an initial performance score of 59%, with the main weaknesses in the aspects of improvement and the environment. The one-year improvement program resulted in an overall score increase of 68%, as well as significant improvements in awareness of burnout prevention, the effectiveness of the Safety Accountability Program, and the implementation of 5R audits. The implementation of GMP-based subcontractor management strengthened with structured guidance and risk management has proven effective in improving safety culture, operational discipline, and performance quality. However, continuous improvement is still necessary to maintain consistency and sustainability of performance.

Keywords: Management of Mining Services Company, CSMS, Putra Perkasa Abadi



PENDAHULUAN

PT Putra Perkasa Abadi (PPA) merupakan perusahaan kontraktor jasa pertambangan yang beroperasi di wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Borneo Indobara yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Republik Indonesia (Pratama et al., 2021; Wijayanto & Hadi, 2020). Melihat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara Asia, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 penggunaan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Asia akan mencapai 7 miliar ton (Brammer & Mulyadi, 2021; Liu et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan batubara di Asia akan terus meningkat seiring waktu (Nasution et al., 2022; Tan & Rahayu, 2023). Indonesia sebagai salah satu negara produsen batubara terbesar di dunia memiliki peluang untuk meningkatkan produksi batubara guna memenuhi permintaan yang terus meningkat di pasar tersebut (Suryani et al., 2020; Hadi & Prasetyo, 2021).

Didorong oleh permintaan, produksi global terus meningkat (0,8%), namun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan periode 2021–2022 (7,4%). Negara-negara Asia merupakan produsen yang paling aktif (Tiongkok, India, dan Indonesia) (Energy, 2025). Indonesia adalah pengeksport batu bara terbesar di dunia, dan komoditas ini menjadi pusat bagi perekonomiannya, menghasilkan penerimaan pajak dan lapangan pekerjaan. Karena itu, penurunan permintaan jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi negara dengan sekitar 280 juta penduduk tersebut. Produksi batu bara Indonesia masih terus meningkat, mencapai rekor 836 juta ton pada 2024, atau hampir 8% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (GHOSAL, 2025)

Dalam implementasi kegiatan jasa pertambangan PPA Berkomitmen untuk melakukan praktik baik dalam kegiatan pertambangan atau di sebut sebagai good mining practice (GMP) (Sufriadin et al., 2023). GMP merupakan mandat dari perundangan yang di atur di dalam Peraturan Menteri ESDM No 1827 Tahun 2018 tentang pedoman kadih pertambangan yang baik. Dijelaskan bahwa Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan (ESDM, 2018). Didalam pengelolaan perusahaan Jasa Pertambangan PPA memiliki izin usaha IUJP yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan bisnis proses yang dilakukan. Namun, dalam aktifitas operasional yang memiliki ruang lingkup lebih luas dan bersifat penunjang PPA melakukan optimalisasi dengan dibantu oleh mitra kerjanya.

Perusahaan Mitra kerja yang disebut sebagai subkontraktor di PPA berjumlah 35 perusahaan dengan total karyawan Subkontraktor 3000 dari total 7000 karyawan di jobsite PT Borneo Indobara (BIB). Dalam implementasinya PPA melaksanakan mandat undang – undang terkait usaha Jasa Pertambangan inti yakni adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Serta PPA memiliki mitra kerja baik Inti dan non inti dimana perusahaan Non inti merupakan usaha jasa selain Usaha Jasa Pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. (ESDM, 2018)

Implementasi keselamatan dan operasional yang aman perlu di dorong untuk mengedepankan penerapan kaidah pertambangan yang baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan asas Transparansi, Kepatutan dan Kewajaran dengan fokus pada mitra yang setara dan inklusif. Peran pengelola keselamatan diperlukan untuk tetap membuat aktifitas pekerjaan berjalan seiring dengan upaya harapan keselamatan yang

tinggi. Oleh karena itu pendekatan pengelolaan subkontraktor ini diawali dengan pemilihan perusahaan jasa pertambangan, Prakualifikasi, pelaksanaan Tender, Kontrak kerjasama, pertemuan awal sebelum proyek dimulai, dan implementasi serta diakhiri dengan evaluasi perusahaan jasa pertambangan. Dengan pendekatan GMP yang diatur didalam regulasi PT PPA berharap subkontraktor yang mulanya memiliki budaya, kiblat dan acuan beranekaragam dapat disatukan dengan mekanisme pengelolaan dengan pendekatan CSMS berbasis GMP yang baik dan mumpuni.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah Identifikasi masalah, Kesesuaian dengan standar legalitas perusahaan, Implementasi dengan pilihan program yang didasari manajemen risiko dan evaluasi atas kinerja yang dilaksanakan oleh perusahaan subkontraktor. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di PT Putra Perkasa Abadi Jobsite Borneo Indobara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan studi evaluasi dengan pendekatan kualitatif.

Populasi karyawan subkontraktor adalah 3000 karyawan dengan jumlah subkontraktor 35 perusahaan yang terdiri atas perusahaan inti dan non inti. Sample yang diambil adalah evaluasi atas 100% perusahaan dengan skema pendekatan GMP (Good mining practice) 6 aspek. Aspek tersebut terdiri atas aspek Teknis, Aspek Keselamatan pertambangan, aspek lingkungan hidup, aspek SMK3 (Sistem manajemen keselamatan pertambangan) berdasarkan Kepdirjen ESDM 185 Tahun 2019, Aspek Aspek Usaha Jasa, Aspek Improvement (Inovasi berkelanjutan). (ESDM, 2018).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penilaian secara langsung presentasi (Wawancara Penanggung Jawab Operasional) saat melaksanakan evaluasi dan data sekunder berdasarkan bukti hasil evaluasi berkas dan unjuk kerja yang telah dilaksanakan selama periode 6 bulan. Berdasarkan jenis teknik pengumpulan data macam-macam teknik pengumpulan data didasarkan pada observasi, wawancara, dokumentasi atau triangulasi / gabungan. (Sugiyono, 2013) Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi atau triangulasi. Waktu penelitian ini adalah selama 2 kali periode evaluasi perusahaan jasa yakni semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025. Secara keseluruhan penelitian dilakukan pada Juli 2024-Juli 2025 (1 tahun periode).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan Perusahaan jasa

Proses pertama dalam pengadaan perusahaan adalah kebutuhan perusahaan jasa pertambangan. Pemberi kerja dalam hal ini PPA mengajukan kepada departemen selaku tim yang akan melakukan seleksi dengan mengirimkan data sebagai berikut : a) Jenis Kebutuhan perusahaan jasa. b) Perusahaan Jasa Inti dan Non inti (Kualifikasi perusahaan jasa Pertambangan). c) Sumberdaya yang dimiliki. d) Kesesuaian Legalitas perusahaan

Adapun ketertiban dalam pengiriman kebutuhan jasa mencapai 100% oleh departemen yang menjadi custodian di PPA. Dalam hal ini kategori kebutuhan usaha jasa merupakan bagian dari proses CSMS. CSMS atau Contractor Safety Management System merupakan pendokumentasian suatu mekanisme kontrol dalam bentuk panduan untuk menjamin standar usaha dalam pengelolaan kinerja HSE dari para kontraktor (Rusba, 2022).

Mekanisme Pemilihan Perusahaan Jasa Pertambangan

Dalam proses seleksi perusahaan PPA dipaparkan mengenai perusahaan yang lolos kualifikasi yang telah dilakukan oleh bagian tertentu di perusahaan. Adapun pertimbangan yang diambil berdasarkan: 1) Penggunaan perusahaan jasa pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP harus didasarkan pada kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi dan kewajaran. 2) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP mengutamakan perusahaan jasa pertambangan lokal. 3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal, pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional. 3) Perusahaan pemberi kerja berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pertambangan dan energi serta Dinas yang membidangi perdagangan provinsi untuk mendapatkan daftar perusahaan jasa pertambangan lokal. 4) Dalam hal tidak terdapat perusahaan pertambangan jasa nasional, pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) (ESDM, 2018)

Kontrak kerjasama

Perusahaan subkontraktor yang telah lolos tender akan dilanjutkan dengan kontrak kerjasama dengan pemberi kerja. Secara Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Dalam konteks bisnis, hukum berperan sebagai landasan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak dalam transaksi bisnis (Grâu-Panțureac, 2023) Pentingnya kontrak bisnis dalam dunia usaha juga tercermin dari peranannya dalam memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta menjadi dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Penelitian terbaru menyoroti bahwa efektivitas kontrak bisnis sangat dipengaruhi oleh kejelasan isi, mekanisme penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak (Fahmi, 2023) Berdasarkan Analisa dilakukan seluruh subkontraktor telah 100% memiliki kontrak dengan asas yang di persyaratkan.

Implementasi program

Program yang dilakukan oleh perusahaan jasa setelah kontrak dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Presentasi calon penanggung jawab operasional

Presentasi calon penanggung jawab operasional dilaksanakan pada awal pekerjaan sebelum proses mobilisasi dilaksanakan, adapun item yang menjadi kunci bahwa personal lulus kualifikasi Adalah: 1) Kompetensi Calon PJO. 2) Komitmen Manajemen puncak Perusahaan. 3) Lagging dan leading yang di rencanakan selama periode kedepan. 4) Perencanaan yang menjelaskan 6 Aspek *Good Mining Practice* (GMP) sebagai pra evaluasi saat melaksanakan evaluasi di akhir periode

b. Program pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh perusahaan PPA kepada mitra kerja/subkontraktor menggunakan pendekatan kemitraan PPA menempatkan subkontraktor adalah bagian dari aset berharga karyawan olehkarena itu tidak ada perbedaan dalam mengelola karyawan. Pembinaan yang dilakukan adalah seputar implementasi dalam aspek

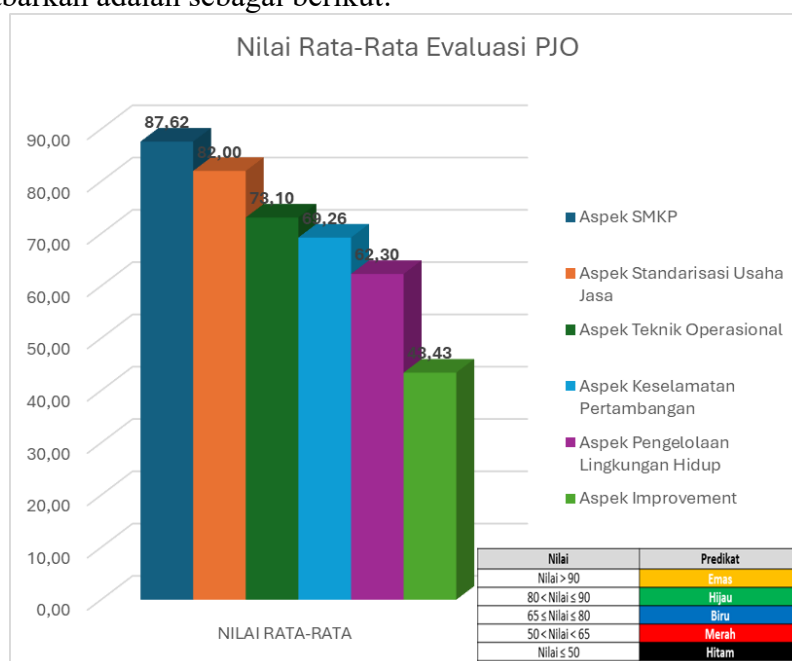
operasional dan keselamatan yang diwajibkan didalam pemenuhan lagging (Indikator hasil) dan leading (Indikator proses). Pembinaan di laksanakan selama periode tahun 2024 dengan pencapaian 100% dengan target 1 kali per bulan (Terlampir).

c. Evaluasi

Evaluasi perusahaan jasa dilakukan selama periode Bulanan dan Semester. Evaluasi Bulanan dilaksanakan dengan laporan kinerja keselamatan, Kinerja semester yang dilakukan adalah dengan evaluasi perusahaan jasa dengan mempertanggungjawabkan 6 aspek GMP yang telah di tentukan menggunakan *tools* evaluasi kinerja perusahaan.

Penentuan baseline

Evaluasi di tahun 2024 semester 2 merupakan angka dasar (Baseline) yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja di periode selanjutnya. Adapaun nilai baseline semester 2 tahun 2024 adalah senilai 59% dengan kategori merah, data baseline dijabarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. hasil evaluasi PJO

Berdasarkan hasil evaluasi PJO, diperoleh nilai rata-rata 59% pada enam aspek penilaian sebagai berikut: a) Aspek SMKP (Proses, hasil dan evaluasi bukan nilai hasil audit) memperoleh nilai tertinggi, yaitu 87,62, yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan berada pada kategori Hijau ($80 < \text{nilai} \leq 90$) dan mendekati kategori Emas. b) Aspek Standardisasi Usaha Jasa mencatat nilai 82,00, juga berada pada kategori Hijau, yang menggambarkan bahwa pemenuhan standar administratif dan legalitas usaha telah berjalan baik. c) Aspek Teknik Operasional mendapatkan nilai 73,10, termasuk dalam kategori Biru ($65 < \text{nilai} \leq 80$). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan aspek teknis masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level hijau. d) Aspek Keselamatan Pertambangan memperoleh nilai 69,26, yang berada pada kategori Biru. Nilai ini menegaskan adanya kebutuhan peningkatan konsistensi dalam implementasi prosedur keselamatan di lapangan. e) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki nilai 62,30, berada pada batas bawah kategori Biru, sehingga menjadi perhatian penting untuk peningkatan kinerja pengendalian dampak lingkungan.

f) Aspek Improvement merupakan aspek dengan nilai terendah, yaitu 48,43, termasuk kategori Hitam. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan berkelanjutan belum optimal dan diperlukan penguatan dalam implementasi program improvement di seluruh lini operasional.

Program

Berdasarkan *baseline* tersebut akan dilakukan upaya peningkatan dengan metode pendekatan optimalisasi pada aspek sebagai berikut:

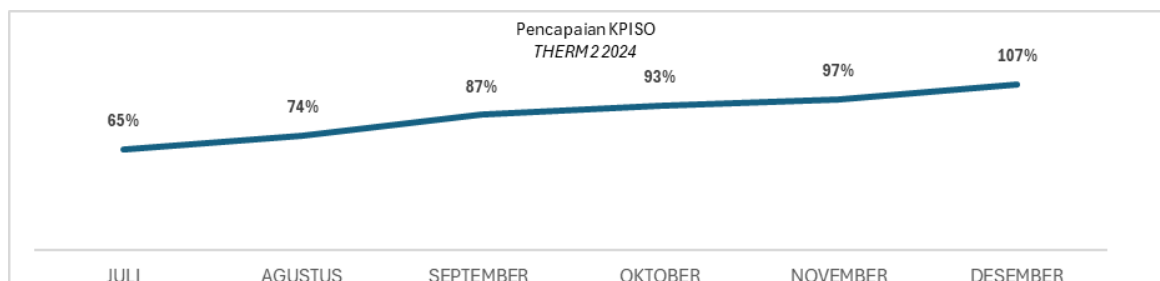
Tabel 1. baseline

N O	Root Cause (What)	Tujuan diimprove (Why)	Rencana Perbaikan (How)	Kapan (When)	Di Mana (Where)	Siapa (Who)	Biaya (How Much)
1	Tidak adanya daily activity untuk SHE Officer Subkontraktor	Meningkatkan perkuatan pengelolaan keselamatan dalam aspek monitoring implementasi untuk menurunkan Potensi kejadian accident	Membuat standarisasi KPI SHE Officer subkontraktor	Agustus-September 2024	Subkontraktor	SHE PJP	-
2	Belum disusun program pendampingan safety knowledge pada subkontraktor	Terbentuknya budaya kerja yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah implementasi keselamatan pertambangan	Membuat jadwal dan kelas terhadap subkontraktor baik dari aspek <i>system</i> dan <i>training awareness</i>	Januari - Februari 2024	Subkontraktor	SHE PJP	Rp. 12.000.000/ Tahun
3	Belum adanya regulasi dalam perkuatan kinerja pengawas dalam melaksanakan program SAP (Safety Accountability Program)	Meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap target leading indicator pengawas	Membuat regulasi berupa aturan yang mengatur target leading <i>indicator</i> pengawas yakni SAP beserta Reward and punishment	Januari-Februari 2024	Subkontraktor	SHE PJP	-
4	Belum Melakukan program	Meningkatkan kesadaran	Melakukan program pengelolaan	Januari 2024	Subkontraktor	SHE PJP	-

N O	Root Cause (What)	Tujuan diimprove (Why)	Rencana Perbaikan (How)	Kapan (When)	Di Mana (Where)	Siapa (Who)	Biaya (How Much)
	pengecekan awal giliran kerja (Fit to work)	dan budaya keselamatan yang berasal dari kesadaran karyawan untuk siap dalam bekerja	kelelahan dengan tidak roaster kerja dan Pengelolaan digitalisasi (Fit to Work)				

Setiap pekerja dituntut untuk dapat memahami K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan cara pencegahannya, dampak dari kecelakaan, undang-undang tentang K3, bahaya serta potensi dari bahaya tersebut (Rarindo, 2021). Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai suatu kebutuhan sehingga memiliki makna dan terpuaskan selain itu manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas, jika suatu kebutuhan sudah terpenuhi maka kebutuhan – kebutuhan yang lain akan muncul dan menuntut pemuasan (Taormina, 2013). Pentingnya perilaku keselamatan kerja mendorong dan memotivasi individu untuk dapat menekan terjadinya kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja saat melakukan aktivitas (Rarindo, 2021). Berdasarkan referensi perubahan perilaku di simpulkan bahwa kegiatan sehari-hari akan berdampak pada ketertiban dan kesesuaian harapan dari tujuan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan mekanisme tersebut perbaikan atas ketidakseusian menggunakan *daily activity* yang dirumuskan sedemikian rupa.

Aspek keselamatan ditinjau dari leading indicator atau indikator proses mencakup berbagai tindakan pencegahan yang bersifat proaktif untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko sebelum terjadi kecelakaan kerja, antara lain melalui inspeksi mendadak terhadap peralatan kerja, kondisi kelelahan pekerja, kesesuaian pengoperasian kendaraan, serta penerapan prosedur *lockout tagout and tryout*. Selain itu, konsistensi pelaksanaan briefing awal sebelum kegiatan kerja, pendampingan aktif oleh pengawas, serta inspeksi mendadak pada kegiatan yang berpotensi *high risk* menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan meningkatkan kewaspadaan seluruh pekerja terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil evaluasi setiap mitra kerja dari bulan Juni-Desember 2024 di dapatkan nilai sebagai berikut:



Gambar 2. KPI

Kesimpulan pada penerapan KPI harian tersebut menjadi upaya untuk perubahan perilaku dari seluruh karyawan dengan adanya teori perubahan perilaku. Terjadi peningkatan terkait program tersebut dimana 1 bulan pelaksanaan karyawan

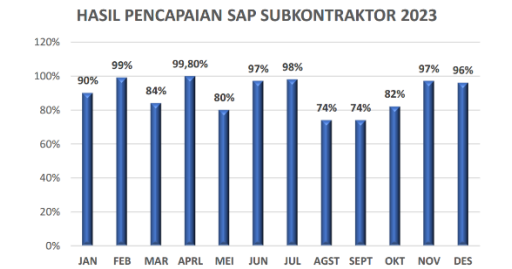
subkontraktor memiliki hasil penilaian 65% dan membutuhkan waktu 6 bulan hingga pencapaian melampaui 100%. Sehingga hal ini sebagai acuan dalam perubahan perilaku membutuhkan waktu 6 bulan. Hal ini relevan dengan artikel ilmiah bahwa Sebuah studi penting tahun 2009 tentang pembentukan kebiasaan menemukan bahwa kebiasaan berkembang dalam rentang 18 hingga 254 hari; para peserta melaporkan membutuhkan rata-rata sekitar 66 hari untuk secara konsisten memasukkan salah satu dari tiga aktivitas harian baru—memakan sepotong buah saat makan siang, minum sebotol air saat makan siang, atau berlari selama 15 menit sebelum makan malam.

Pengulangan harian yang konsisten adalah faktor terbesar yang memengaruhi apakah suatu perilaku dapat menjadi bagian dari rutinitas harian otomatis, kata Lally, yang merupakan penulis pertama dalam studi tersebut.” (Solis-Moreira, 2024). Program selanjutnya adalah melakukan pendampingan pada kegiatan yang dilakukan dengan waktu periode 1 tahun dengan pembahasan sebagai berikut:

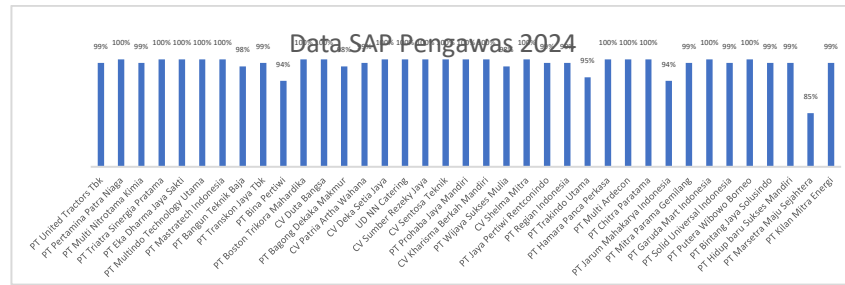
Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan
Evaluasi TSP & Plan TSP	07 Januari 2024	Evaluasi Keselamatan PT Bagong	10 Februari 2024	Pembahasan PO, PT, TT	03 Maret 2024	Review IBPR	01-30 April 2024	Evaluasi TSP bulanan	19 Mei 2024	Laporan OH	04 Juni 2024
Audit SMKPT 2024		Review Keselamatan dan peningkatan performa keselamatan	12 Februari 2024	Pembahasan PO, PT, TT	31 Maret 2024			Review Keselamatan PT United Tractors	29 Mei 2024	Tematik SMKPT Elemen 1	10 Juni 2024
Evaluasi PJO Subkontraktor								Review Keselamatan PT Boston Trikora Mahardika	30 Mei 2024	Evaluasi PJO semester 1 2024	20 Juni 2024
Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan	Tema Materi	Pelaksanaan
Tematik Bimbingan SMKPT Elemen 2	13 Juli 2024	Tematik Bimbingan SMKPT Elemen 3	05 Agustus 2024	Tematik Bimbingan SMKPT Elemen 5-7	18-Sep-24	Volunteer ERT Subkontraktor	17 Oktober 2024	Persiapan Audit SMKPT, Program KPI SQ	29-Nov-24	Pengelolaan SPIP	30 Desember 2024
		Kesehatan Kerja Upaya Cardiovascular Disease	15 Agustus 2024								
		Tematik Bimbingan SMKPT Elemen 4	24 Agustus 2024								

Gambar 4. Pembinaan

Keberhasilan dari pembinaan ini akan dilihat pada hasil evaluasi kinerja perusahaan pertambangan (Evaluasi PJP). Dalam upaya peningkatan kinerja dalam aspek kualitas kepengawasan di buktikan secara pemenuhan SAP dengan adanya regulasi dan perkuatan maka di dapatkan nilai pencapaian kinerja kepengawasan adalah sebagai berikut:



Gambar 5. SAP SUBKONTRAKTOR

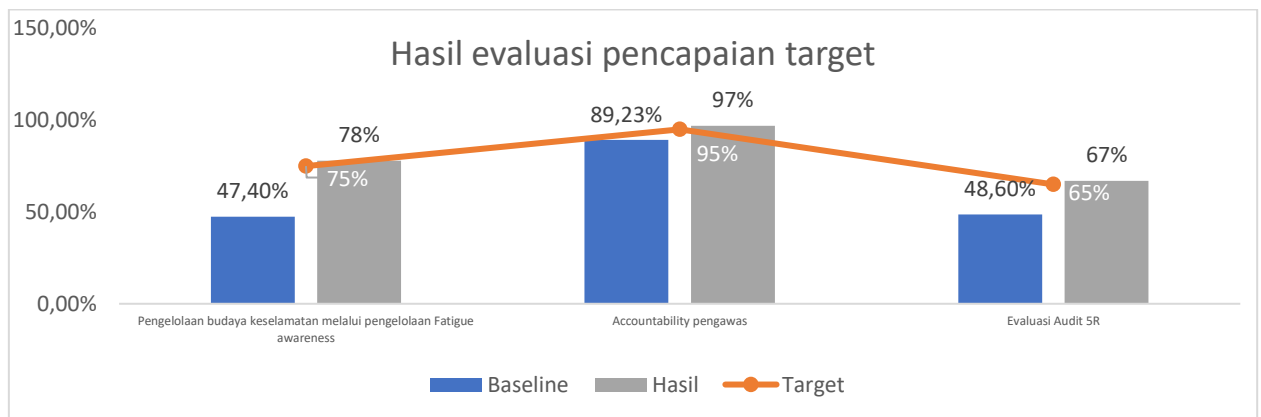


Gambar 6. Sap Pengawas

Pengelolaan pencapaian SAP (*Safety Accountability Program*) dilakukan melalui beberapa inisiatif, antara lain: a) Pemberian sanksi bagi SAP yang tidak memenuhi ketentuan melalui *internal memo*; b) Penyediaan kemudahan akses melalui digitalisasi menggunakan aplikasi; c) Monitoring langsung di lapangan.

Dari hasil penerapan program tersebut, tercapai peningkatan kesadaran pengawas melalui kegiatan *One Day One Inspection* dan *Hazard Report*, dengan capaian meningkat menjadi 97% dari angka baseline sebelumnya sebesar 89,23%. Pelaksanaan program kreatif melalui *audit* 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) menjadi salah satu inovasi dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan kerja, khususnya dalam aspek tata kelola dan tata graha. Implementasi program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana capaian audit pada tahun 2023 berada pada tingkat 48% (kategori Hitam) dan meningkat menjadi 67% (kategori Biru) pada tahun 2024.

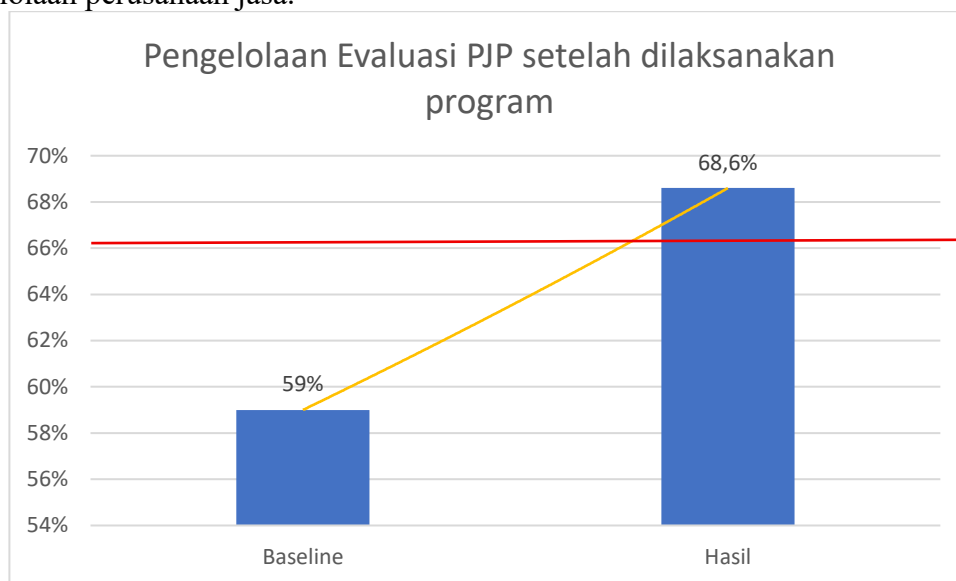
Program inisiatif lainnya adalah *Audit Fatigue*, yang dilatarbelakangi oleh karakteristik kegiatan pertambangan dengan jam kerja yang berbeda dari industri lainnya. Pola kerja 10 jam per shift meningkatkan risiko kelelahan pada pekerja. Sebagai langkah pencegahan, perusahaan mengembangkan program digitalisasi *fit to work* serta melakukan monitoring dan sidak fatigue secara komprehensif setiap bulan. Upaya ini memastikan bahwa 100% karyawan mendapatkan pemeriksaan kondisi kelelahan secara berkala. Melalui implementasi berkelanjutan, nilai *audit fatigue* menunjukkan peningkatan signifikan, dari 47,4% menjadi 78% pada tahun 2025.



Gambar 7. evaluasi pencapaian target

Berdasarkan program yang telah dijalankan memiliki perubahan yang beragam yakni Evaluasi perusahaan jasa mengalami kenaikan dari program-program yang terintegrasi terkait *fatigue management* meningkat dari 47,4% menjadi 78%, Program *Safety accountability program* meningkat dari 89% menjadi 97%, dan evaluasi audit 5R

dari 48,6% menjadi 67%. Kenaikan ini tidak terlepas dari peran dari custodian selaku pengelola perusahaan dan tim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan program pengelolaan perusahaan jasa.



Gambar 8. Evaluasi PJP

Berdasarkan skema inisiatif program di atas, PPA memberikan evaluasi mendalam mengenai bagaimana mekanisme evaluasi yang efektif yakni menggunakan pendekatan GMP (*Good mining practice*) dengan melakukan evaluasi 6 aspek. Dengan baseline pada semester 2 tahun 2024 di dapatkan nilai Rata-rata kategori hitam, kemudian dilakukan evaluasi setelah program berjalan yakni pada semester 1 tahun 2025 dan didapatkan nilai 68,6%. Mekanisme penilaian dilaksanakan melalui evaluasi kinerja menggunakan dokumen dan rekaman yang mencakup enam aspek utama, yaitu aspek teknis, keselamatan pertambangan, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), lingkungan hidup, usaha jasa, serta aspek perbaikan atau *improvement*, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh seluruh Penanggung Jawab Operasional (PJO) perusahaan subkontraktor. Proses penilaian dilakukan oleh IUP dan PPA selaku pemberi kerja sebagai pihak yang berwenang, dan hasil penilaian menunjukkan adanya peningkatan kinerja secara menyeluruh pada keenam aspek tersebut dengan nilai rata-rata sebesar 68,6 persen yang masuk dalam kategori penilaian Biru.

KESIMPULAN

Pengelolaan Budaya Keselamatan melalui *Fatigue Awareness* menunjukkan peningkatan signifikan dari 47,40% menjadi 75%, mendekati target 78%. Ini menandakan program fatigue awareness berjalan efektif dan memberikan dampak nyata pada peningkatan budaya keselamatan. Accountability Pengawas merupakan pencapaian terbaik, dengan kinerja naik dari 89,23% menjadi 95%, hanya sedikit di bawah target 97%. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan tanggung jawab pengawas dalam pelaksanaan keselamatan sudah berada pada level yang sangat baik. Evaluasi Audit 5R meningkat dari 48,60% menjadi 65%, masih di bawah target 67%, tetapi menunjukkan progres positif. Perlu peningkatan pada konsistensi pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan di lapangan. Sebagai impact dan dampak hasil kenaikan berpengaruh terhadap kinerja PJP (Perusahaan Jasa Pertambangan) Pengelolaan Evaluasi CSMS berhasil

meningkat dari baseline 59% menjadi 68,6%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan efektivitas proses evaluasi CSMS, meskipun masih terdapat ruang peningkatan dalam konsistensi implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brammer, M., & Mulyadi, F. (2021). Asia's growing demand for coal: Trends and implications for global markets. *Energy Economics*, 85, 104577. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.104577>
- Energy, W. (2025, September 17). Global coal production. Dalam *The Energy Institute Statistical Review of World Energy™ 2025*. <https://www.planete-energies.com/en/media/figures/global-coal-production>
- ESDM. (2018). *Pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Fahmi, C. H. (2023). Model of legal dispute resolution of business contract default. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>
- Ghosal, A. (2025, June 17). Indonesian coal industry risking a tough transition as demand declines, report says. *Associated Press*. <https://apnews.com/article/coal-china-indonesia-energy-india-903d586d6e3e4ff69a2dea0497eef9fd>
- Grău-Panțureac, M. (2023). The importance of contracts in business relationship. *Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.53486/cike2022.55>
- Hadi, P., & Prasetyo, A. (2021). Indonesia's role in the global coal market: Opportunities and challenges. *Journal of Energy and Environmental Economics*, 30(4), 300–315. <https://doi.org/10.1016/j.jeeec.2021.07.001>
- Liu, Z., Zhang, Y., & Wang, X. (2020). Forecasting coal demand and its impact on the global energy market: A study of Asian economies. *Journal of Energy and Power*, 12(2), 170–185. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.02.010>
- Nasution, M., Raharjo, S., & Sari, D. (2022). Economic growth and the future of coal in Asia: An analysis of energy demands and supply strategies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 135, 110104. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110104>
- Pratama, E., Tan, H., & Widodo, P. (2021). Indonesia's coal industry and its opportunities for growth in the global market. *International Journal of Mining and Mineral Processing*, 42(3), 225–238. <https://doi.org/10.1016/j.ijmmp.2021.03.005>
- Rarindo, H. (2021). Perilaku keselamatan kerja sebagai moderator hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja pada pekerja konstruksi. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 12(1), 52–63. <https://doi.org/10.26740/jptt.v12n1.p52-63>
- Rusba, K. (2022). Contractor Safety Management System (CSMS). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Sufriadin, S., Nur, I., Ilyas, A., Amalia, R., Gautama, A., Rivai, U. T., & Fikriawan, A. I. (2023). Sosialisasi dan Pembinaan Kaidah Penambangan Yang Baik (Good Mine Practice) Bagi Penambang Dan Masyarakat Lingkar Tambang Batubara Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 37–49.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, M., Wijayanto, D., & Yuliana, A. (2020). Indonesia's coal production: A key driver for meeting global demand. *Journal of Energy Resources Technology*, 142(5),

052401. <https://doi.org/10.1115/1.4048374>

Taormina, R. J. (2013). Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs. *The American Journal of Psychology*, 126(2), 155–177. <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.126.2.0155>

Tan, L., & Rahayu, S. (2023). Increasing coal production in Indonesia: Economic implications and sustainability considerations. *Energy Policy*, 151, 112030. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112030>